



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN PIMPINAN KOMISI DAN PIMPINAN PANSUS DPR RI
DALAM RANGKA EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017
DAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018**

TANGGAL 17 OKTOBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Selasa, 17 Oktober 2017.
P u k u l	: 15.10 WIB s/d 16.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membicarakan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 30 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota. - Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI; - Pimpinan Pansus

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada pimpinan komisi dan pimpinan Pansus untuk menyampaikan pandangan/usulannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pimpinan Komisi-Komisi menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pimpinan Komisi I

- Komisi I telah melakukan tugasnya yang tercantum dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, yaitu melakukan penyusunan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang RTRI.
- Komisi I juga telah menyerahkan draft RUU tentang Penyiaran kepada Badan Legislasi pada bulan Februari 2017 untuk dilakukan harmonisasi.
- Komisi I berharap kiranya proses pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran dapat segera diselesaikan pada Masa Persidangan I ini dan dapat segera diusulkan untuk menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna.
- Beban tugas dari Komisi I selain melakukan pembahasan RUU, Komisi I juga melakukan pembahasan atas beberapa RUU Kumulatif Terbuka.

2. Pimpinan Komisi II : Tidak Hadir

3. Pimpinan Komisi III : Tidak Hadir

4. Pimpinan Komisi IV : Tidak Hadir

5. Pimpinan Komisi V : Tidak Hadir

6. Pimpinan Komisi VI : Tidak Hadir

7. Pimpinan Komisi VII:

- Komisi VII mendapatkan tugas untuk melakukan penyusunan draft Naskah Akademis dan draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba).
- Pada bulan April 2017, Komisi VII telah menyampaikan draft NA dan RUU Migas kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi.
- Adapun untuk RUU Minerba saat ini dalam tahap akhir penyusunan draft Naskah Akademik dan RUU.
- Komisi VII mengharapkan proses pengharmonisasian RUU Migas dapat segera diselesaikan dan diusulkan sebagai RUU Usul DPR.
- Untuk usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Komisi VII mengusulkan sebagai berikut :
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas);
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba);
 - RUU tentang Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagai usulan baru yang juga belum masuk dalam Prolegnas 2015-2019;
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.

8. Pimpinan Komisi VIII:

- Perkembangan dari pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah saat ini sudah pada tahap pembahasan DIM.
- Untuk RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial masih dalam tahap penyusunan draft RUU dan NA dengan melibatkan stakeholder terkait dan juga Badan Keahlian DPR.
- Komisi VIII mendapatkan tugas melakukan pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan pembahasan yang telah dilakukan masuk pada tahap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- Untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Komisi VIII mengusulkan 3 (tiga) RUU, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial; dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

9. Pimpinan Komisi IX : Tidak Hadir

10. Pimpinan Komisi X : Tidak Hadir

11. Pimpinan Komisi XI : Tidak Hadir

12. Pimpinan Pansus RUU tentang Pertembakauan menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- Pansus Pertembakauan sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menjaring masukan dari stakeholder terkait untuk dapat menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas dan juga berdaya laku cukup lama.
- Berdasarkan hasil kunjungan Pansus Pertembakauan dapat diketahui bahwa di NTB merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi pusat pertembakauan nasional.
- Selain di NTB, di Jawa Timur khususnya Kota Malang, merupakan salah satu daerah yang juga bisa berkembang menjadi penghasil tembakau.
- Pansus mengharapkan respon dari Pemerintah terkait dengan adanya kegiatan dari Pansus dalam melakukan pembahasan RUU tentang Pertembakauan agar RUU ini dapat segera diselesaikan.
- Kiranya RUU tentang Pertembakauan tetap dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

13. Pimpinan Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- Pansus RUU Wawasan Nusantara telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah melakukan konsultasi dengan DPD RI, RDP dengan Gubernur Lemhanas, RDP dengan Rektor dari beberapa universitas.
- Pansus juga telah mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik ke beberapa stakeholder terkait guna mendapatkan masukan/pandangannya, namun demikian sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan umpan balik dari stakeholder dimaksud.

- Pansus mengharapkan masukan dan saran dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi terhadap tindaklanjut dari pembahasan RUU di masa mendatang.
14. Pimpinan Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol menyampaikan laporannya sebagai berikut :
- Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati karena belum adanya kesepakatan antara Pansus dan Pemerintah mengenai Judul RUU.
 - Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sampai pada masa sidang telah sampai pada tahap Panitia Kerja dan baru menyelesaikan 3 (tiga) cluster dari total keseluruhan jumlah cluster sebanyak 7 (tujuh) cluster.
 - 3 (tiga) cluster yang telah diselesaikan oleh Panja yaitu : cluster judul dan konsiderans; cluster klasifikasi minuman beralkohol; dan cluster peran serta masyarakat.
15. Pimpinan Pansus RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menyampaikan laporannya sebagai berikut :
- Pansus Sisnas Iptek mulai melakukan pembahasan RUU diawali dengan Rapat Kerja bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - Saat ini Pansus Sisnas Iptek dalam tahap pengumpulan data dengan menerima masukan/pandangan dari pihak-pihak terkait dan juga sedang dilakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM oleh fraksi-fraksi).
 - Adapun agenda kegiatan selanjutnya adalah RDPU dengan lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder untuk memberikan masukan dan aspirasinya.
 - Diharapkan pada akhir tahun 2017, proses pembahasan RUU Sisnas Iptek oleh Pansus telah dapat diselesaikan.

- B. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pada prinsipnya seluruh Anggota Badan Legislasi dapat menerima usulan-usulan dari Komisi dan Pansus.
 2. Diharapkan proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dapat segera masuk tahap selanjutnya yaitu mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI serta pembentukan Panja.

III. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

menyetujui/menyepakati untuk menerima seluruh masukan/
pandangan yang telah disampaikan pimpinan Komisi dan Pansus
untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah pada Rapat Kerja
Penyusunan dan Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001